



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-29827793, Faksimile: 021-21281200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

Nomor : Und. 05 /PBJ/Duksar-PRB/BNPB/D-III/PPSE/2018
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi

Jakarta, 3 September 2018

Kepada Yth.

PT. GLORIA ALBHA ANUGERAH
di Jakarta

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Dukungan Pemasaran Pameran Pengurangan Risiko Bencana, maka akan dilakukan pembuktian kualifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan dan kepastian terhadap dokumen administrasi dan teknis kualifikasi yang telah disampaikan oleh perusahaan Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diminta kepada Saudara atau yang dikuasakan untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 September 2018
Pukul : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Graha BNPB Lantai 7, Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur

Catatan : Agar Saudara membawa dokumen asli dan copy yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan menyerahkan 1 (satu) rangkap dokumen copy, antara lain :

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. SIUP, TDP, Domisili yang masih berlaku
3. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) di Bidang Penyelenggaraan MICE (5.00.01) – Sub Bidang : Penyediaan Barang/Jasa Pendukung MICE (5.00.01.07), Event Organizer (5.00.01.09)
4. NPWP dan Bukti lunas SPT Tahun Terakhir (Pembayaran SPT Tahun 2017)
5. Pakta Integritas
6. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya dibubuhi materai
7. Surat Pernyataan bahwa semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam dibubuhi materai

Atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pokja ULP
Pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BNPB

TTD



Tembusan Kepada Yth :

1. Sestama BNPB selaku KPA;
2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. PPK Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi;
4. Ketua ULP.